

PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM DAN PROSPEKNYA DI MASA DEPAN DITINJAU DARI ASPEK PENGELUARAN DANA PEMBANGUNAN

FACHRIZAL BACHRI

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

The study focused on discussion of current Pagar Alam city local finance in regional development and its relation to the future prospect including the constraints and limitations faced in terms of budget allocation and execution of development. The study also discussed the relation between the ability of its local finance in regional development and its relation to the formation of a new regency (Tanah Besemah regency) which includes City of Pagar Alam. Assuming the security and political environments are conducive and spacious area is not increased so the prospects of PAD revenues in the future tends to increase. Thus the expected development in Pagar Alam will be better and move forward. In line with the expectation, the economy of Pagar alam will get better performance and the employment opportunities will be widened, and finally the people's welfare will also increase. Further efforts expected by the City of Pagar Alam government are to increase communities prosperity programs through increasing local finance revenues which is owned as well as through regional and global competition.

Keywords: Regional Revenue, Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam era otonomi saat ini, disamping memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini tetap mengacu pada bagian integral dari pembangunan nasional yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu : (1) faktor manusia, (2) faktor keuangan, (3) faktor peralatan, (4) faktor organisasi dan manajemen. Hal inilah yang harus dipersiapkan oleh daerah secara cermat dan terencana. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan DPRD sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” harus memosisikan dirinya pada posisi yang tepat. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah peluang untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bukan sebagai salah satu “penikmat” dana rakyat, tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana yang “tersedia” bagi daerah. Dengan kata lain pemerintah (Stakeholder) hendaknya menjadi subjek dan objek pembangunan di daerah.

Sebagai subjek yaitu ikut berperan aktif dalam pembangunan dan sebagai objek merupakan sasaran dari pembangunan tersebut.

Dengan melihat latar belakang di atas, kajian ini dibatasi pada permasalahan yaitu bagaimana pembangunan di Kota Pagar Alam selama ini serta prospeknya di masa depan. Dalam kajian juga akan dibahas mengenai kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah. Pemilihan kota Pagar Alam dengan alasan bahwa kota ini salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat yang menunjukkan kemajuan pembangunan fisik yang pesat. Disamping itu ada wacana sebagian "elit" yang berkeinginan membentuk Kabupaten baru (Kabupaten Tanah Besemah). Dalam hubungannya dengan kemungkinan bila terjadinya pembentukan kabupaten baru yang ingin mengikutkan Kota Pagar Alam, maka penelitian ini juga membahas kendala serta keterbatasan yang dihadapi dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pagar Alam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi besarnya kemampuan keuangan daerah Kota Pagar Alam, hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melihat prospek pembangunan Kota Pagar Alam di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Komponen dana perimbangan mendominasi penerimaan daerah di Kota Pagar Alam. Ini berarti adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber dana dari pusat. Namun demikian, dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode analisis hasilnya telah melampaui target yang telah ditetapkan dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya persentasi kontribusi PAD terhadap total penerimaan di Kota Pagar Alam dan berarti semakin meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan yang diikuti semakin meningkatnya kemampuan kemandirian fiskal di Kota Pagar Alam. Selain itu kontribusi DAU terhadap total penerimaan di Kota Pagar Alam kecenderungannya terus mengalami penurunan dan rasio PAD terhadap PDRB Kota Pagar Alam mengalami peningkatan. Ini berarti pelaksanaan pembangunan di Kota Pagar Alam telah mampu meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio antara PAD dengan belanja rutin menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan semakin menurunnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam terhadap pemerintah pusat dan mengindikasikan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi PAD. Derajat desentralisasi fiskal dan perpajakan daerah di Kota Pagar Alam cenderung mengalami peningkatan dan tergolong cukup tinggi. Indeks Pelayanan Publik Per Kapita Kota Pagar Alam cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selama periode analisis, Pelayanan Publik per kapita lebih kecil dari Standar Kebutuhan Fiskal. Ini artinya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam terhindar dari masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah, yang dapat menyebabkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam mengelola manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, integrated dengan selalu mengedepankan efektivitas dan efisiensi serta efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap rupiah pengeluaran.

Dilihat dari kapasitas fiskal, posisi fiskal selama periode analisis adalah kuat, yang ditunjukkan dengan besarnya kapasitas fiskal rata-rata 828,62 atau nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2005 dan 2006 koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (elestis) yang berarti PDRB Kota Pagar Alam berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD. Ini artinya, penerimaan PAD Kota Pagar Alam cukup peka terhadap

perubahan PDRB. Dengan kata lain, setiap kenaikan 1 (satu) persen PDRB akan menaikkan PAD Kota Pagar Alam dalam persentase yang lebih besar.

b. Hambatan-hambatan Serta Kendala Yang Dihadapi

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dengan peluang ini maka pemerintah daerah harus semakin proaktif untuk mengoptimalkan potensi daerah. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada, menjalin kerja sama dengan masyarakat di wilayah ataupun masyarakat luar daerah, dan membenahi diri agar benar-benar mampu sebagai fasilitator barang dan jasa publik. Tetapi di lain pihak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu antara lain :

1. Selama periode penelitian ternyata menunjukkan bahwa secara vertikal APBD pada sisi penerimaan didominasi oleh pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi sebesar 94,77 persen. Ini menunjukkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi.
2. Kendala alokasi pengeluaran APBD yaitu lemahnya aspek perencanaan APBD, aspek sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi antar lembaga.
3. Untuk meningkatkan posisi fiskal, dari aspek upaya pengumpulan PAD (UPAD) dan indeks kinerja PAD (IKPAD), maka Pemda Kota Pagar Alam perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber PAD. Adapun tantangan yang perlu dilakukan Pemda Kota Pagar Alam untuk memperbaiki sistem pengumpulan pajak dan retribusi daerah, antara lain; (1) metode menghitung potensi yang efektif, sistematis dan rasional; (2) pelaporan hasil pengumpulan PAD secara teratur perlu dimonitor dan dibandingkan dengan target dan potensi; (3) memberikan penghargaan bagi pengelola keuangan daerah yang memiliki integritas yang tinggi; dan (4) memberikan insentif pajak, misalnya local tax holiday untuk menarik investor; serta (5) melakukan kemitraan (joint venture).

c. Prospek Pembangunan Kota Pagar Alam Di Masa Depan

Prospek penerimaan PAD di Kota Pagar Alam di masa-masa yang akan datang diperkirakan cenderung akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan makin berkembang dan majunya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam. Asumsi yang digunakan bahwa kondisi keamanan dan politik yang kondusif dan luas wilayah tidak bertambah. Bila kondisi keamanan dan politik tidak kondusif dan luas wilayah bertambah, umpama terbentuknya kabupaten baru (Kabupaten Besemah) yang memasukkan Kota Pagar Alam sebagai wilayah tersebut, maka justru yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya dengan bertambah luasnya wilayah (bila memasukkan wilayah Kecamatan Tanjung Sakti dengan luas wilayah 500,59 km dengan jumlah penduduk 28.710 jiwa, Kecamatan Kota Agung dengan luas wilayah 197,57 km dengan jumlah penduduk 17.190 jiwa, Kecamatan Jarai dengan luas wilayah 205,02 km dengan jumlah penduduk 25.666 jiwa dan Kecamatan Pajar Bulan dengan luas wilayah 201,34 km dengan jumlah penduduk 18.226 jiwa) (BPS, 2006), berarti bertambah luas wilayah pembangunan dan bertambah besar pula dana pembangunan yang mesti disediakan. Dengan PPP (jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita) di Kota Pagar Alam sebesar Rp 1.395.900 per tahun (lihat Tabel 3.10), maka diperkirakan tambahan dana pengeluaran yang diperlukan untuk membangun keempat kecamatan baru tersebut minimal Rp 125.340 juta per tahun (89.792 jiwa x Rp1.395.900).

Sementara itu penerimaan yang bersumber dari PAD, walau akan mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut dalam persentase yang lebih kecil dibandingkan peningkatan pengeluaran dana pembangunan yang diperlukan. Dengan kata lain pengeluaran

dana pembangunan akan jauh meningkat dibandingkan dengan peningkatan penerimaan PAD. Hal ini karena penerimaan PAD sebagian besar bersumber dari wilayah kecamatan perkotaan yang telah maju, seperti berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan redistribusi-redistribusi. Dengan menurunnya kemampuan daerah dalam pembangunan, berarti justru akan dapat menurunkan tingkat aktivitas kegiatan ekonomi yang selanjutnya dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut yang akhirnya cita-cita untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bertambah sulit untuk dapat dicapai. Dengan demikian bila luas wilayah bertambah umpama terbentuknya Kabupaten Besemah dengan memasukkan Kota Pagar Alam, maka akan menambah beban pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan justru akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Sebaliknya bila Kota Pagar Alam tetap berdiri sendiri sebagai daerah otonom, maka prospek pembangunan di masa depan diperkirakan akan semakin baik. Hal ini terlihat dari data-data yang menunjukkan tren perkembangan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik dan kemampuan kemandirian fiskal yang semakin baik pula. Dengan demikian diperkirakan pembangunan di Kota Pagar Alam akan semakin baik dan maju, akibatnya perekonomian rakyat akan semakin baik dan selanjutnya kesempatan kerja akan semakin luas dan akhirnya kesejahteraan rakyat juga akan semakin meningkat.

PENUTUP

Rekomendasi

1. Melihat kenyataan bahwa dari struktur penerimaan keuangan daerah Kota Pagar Alam, yakni proporsi PAD terhadap APBD masih rendah, maka untuk meningkatkan peranan PAD, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam perlu melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan melakukan inventarisasi sumber-sumber PAD, dengan cermat untuk mendapatkan tingkat potensi yang optimal sebagai dasar dalam penetapan target, baik terhadap sumber-sumber yang telah ada maupun terhadap sumber-sumber PAD yang baru (eksentifikasi) fiskal. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD untuk mencegah kebocoran-kebocoran, dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dengan memperhatikan Value For Money (VFM).
2. Dalam menentukan kinerja PAD perlu suatu kajian mendalam mengenai potensi riil dan juga analisis surplus, pendataan yang akurat, penetapan yang adil, keterpaduan dan koordinasi antar instansi terkait dan penegakan hukum bagi yang tidak atau menghindari dari pajak/retribusi daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah. Dalam pada itu, dari aspek kebutuhan fiskal, maka Pemda Kota Pagar Alam perlu melakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif melalui kebijakan penyusunan standar analisis belanja. Berkaitan dengan itu, perlu dikurangi pemahaman adanya dikotomi antara PAD dan Dana Perimbangan (transfer).
3. Upaya mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Lahat yang diusulkan sekelompok orang adalah dengan pembentukan Kabupaten Tanah Besemah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Kota Agung dan penggabungan Kota Pagar Alam (Kecamatan-kecamatan yang ada didalamnya) tidak dapat diterima. Dasar pemikirannya adalah administrative region dan homogenous region termasuk sejarah dan etnis Besemah. Konsep pemikiran ini memiliki banyak kelemahan karena akan terjadi peningkatan rasa kesukuan dalam kemajemukan, penurunan perekonomian dan peran Kota Pagar Alam terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu, perencanaan pembangunan harus diulang kembali dari awal karena beralih dari konsep pembangunan kota ke konsep pembangunan kabupaten. Hal ini akan merubah Undang-undang yang telah ada yaitu UU tentang

pembentukan Kota Pagar Alam dengan UU yang baru. Belum lagi beban keuangan pemerintah khususnya Kota Pagar Alam pasti mengalami peningkatan sehingga program-program yang telah berjalan pasti terganggu misalnya biaya sekolah gratis sampai dua belas tahun untuk masyarakat di Kota Pagar Alam sulit telaksana. Bila Kabupaten Tanah Besemah akan dibentuk seperti halnya pembentukan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia, maka pembentukan tersebut sebaiknya tidak memasukkan Kota Pagar Alam sebagai bagian dari wilayah rencana kabupaten tersebut karena Pagar Alam sebagai kota otonom sudah final.

4. Upaya selanjutnya dari Pemerintah Kota Pagar Alam adalah memantapkan peran dan kedudukan Kota Pagar Alam dalam mensejahterakan masyarakatnya baik dari peningkatan potensi lokal yang dimiliki maupun melalui kompetisi regional dan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik, *Kota Pagar Alam Dalam Angka*, 2006
 -----, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Pagar Alam, 2000 – 2006*
 Departemen Dalam Negeri.,1991, Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Jakarta : *Laporan Akhir Penelitian*, Kerjasama Depdagri dan Pispol UGM Yogyakarta
 Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
 Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo, 1994, “Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD “, *Laporan hasil penelitian KKD*, FE UGM Yogyakarta.
 Jamaluddin, Ahmad, 1990, Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat-Daerah, Studi Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta, *Desertasi Doktor Ilmu Ekonomi*, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasi).
 Kaho, Joseph Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
 Reksohadiprodjo, Sukanto, 2000, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.
 Saleh, Samsubar, 1999, *Statistika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-2, BPFE-UGM, Yogyakarta.
 Susanti, H., Ikhsan,M., Widyanti, 1995, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Pertama, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

LAMPIRAN

**Tabel 1. Sumber-sumber Penerimaan Kota Pagar Alam
Tahun 2003-2006 (Dalam Rupiah)**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006	Rerata
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.719.555.227	2.653.069.156	5.592.329.985	5.669.845.372	4.408.699.935
	- Pajak Daerah	636.960.206	694.518.897	849.166.918	1.052.907.315	808.388.334
	- Retribusi Daerah	814.380.963	1.265.886.758	1.375.125.120	1.370.217.253	1.206.402.524
	- Laba Perusahaan Milik Daerah	360.059.827	93.340.495	132.515.022	291.439.551	219.338.724
	- Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.908.154.231	599.323.006	3.235.522.925	2.955.281.253	2.174.570.354
2.	Dana Perimbangan	127.160.405.562	153.077.031.562	179.335.570.767	258.629.719.69	179.550.681.896
	- Bagi hasil Pajak	9.031.539.317	15.546.173.773	23.127.529.007	94.417.059.994	35.530.575.523
	- Bagi hasil Bkn Pajak	26.341.570.345	39.710.014.989	54.489.041.760	-	40.180.209.031
	- Dana Alokasi Umum	88.444.249.900	88.320.842.800	94.829.000.000	134.083.000.000	101.419.273.175
	- Dana Alokasi Khusus	3.343.046.000	9.500.000.000	6.890.000.000	23.400.000.000	10.783.261.500
	- Lain-lain					
3.	Pendapatan yang Sah	3.192.973.791	4.497.923.958	7.367.322.400	6.729.659.700	5.446.969.962
	Jumlah Pendapatan	134.072.934.580	160.228.024.676	192.295.223.152	264.299.656.07	189.406.351.794

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007

**Tabel 2. Pertumbuhan Sumber-sumber Penerimaan Kota Pagar Alam
Tahun 2003 – 2006 (dalam persen)**

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
Pendapatan					
1.	Pendapatan Asli Daerah	0,00	-28,67	110,79	1,39
	- Pajak Daerah	0,00	9,04	22,27	23,99
	- Retribusi Daerah	0,00	55,44	8,63	-0,36
	- Laba Perusahaan Milik Daerah	0,00	-74,08	41,97	119,93
	- Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	-68,59	439,86	-8,66
2.	Dana Perimbangan	0,00	20,38	17,15	44,22
	- Bagi hasil Pajak	0,00	72,13	48,77	308,25
	- Bagi hasil Bukan Pajak	0,00	50,75	37,22	-
	- Dana Alokasi Umum	0,00	-0,14	7,37	41,39
	- Dana Alokasi Khusus	0,00	184,17	-27,47	239,62
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	40,87	63,79	-8,66

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007 (diolah)

**Tabel 3. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran
(Dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2003	2004	2005	2006
Total Pendapatan	154.031	165.509	210.556	264.300
Total Pengeluaran	148.750	165.509	170.155	242.923
Keadaan Defisit/ Surplus	Surplus	Berimbang	Surplus	Surplus

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007

Tabel 4. Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan terhadap Total Penerimaan (dalam persen)

No	Uraian	2003	2004	2005	2006
1.	Pendapatan Asli Daerah	2,77	1,66	2,91	2,09
2.	Dana Perimbangan	94,84	95,54	93,26	95,43
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,38	2,81	3,83	2,48
Total Penerimaan		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007 (diolah)

Tabel 5. Rasio Dana Perimbangan (DAU) terhadap Total Penerimaan (dalam persen)

Uraian	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
* Dana Perimbangan					
- Dana Alokasi Umum	88.444.249.900	88.320.842.800	94.829.000.000	134.083.000.000	101.419.273.175
* Jumlah Pendapatan	134.072.934.580	160.228.024.676	192.295.223.152	271.029.224.766	189.406.351.794
	65,97	55,12	49,31	49,47	54,97

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007 (diolah)

Tabel 6. Target dan Realisasi PAD Kota Pagar Alam Tahun 2003 – 2006 (Dalam Juta)

Uraian	2003		2004		2005		2006	
	A	R	A	R	A	R	A	R
Pendapatan Asli Daerah	3.638	3.720	4.206	2.653	4.493	5.592	4.183	5.670
Pajak Daerah	590	637	676	695	676	849	676	1.053
Retribusi Daerah	618	814	1.444	1.266	1.421	1.375	1.421	1.370
Laba Perusahaan Milik Daerah	75	360	85	93	85	132	85	291
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.355	1.908	2.000	599	2.310	3.235	2.000	2.955

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007

Ket: A = Anggaran; R = Realisasi

Tabel 7. Rasio PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

Uraian	2003	2004	2005	2006
PDRB	466.216	481.654	498.639	517.559
PAD	3.720	2.653	5.592	5.670
Rasio PAD/PDRB	0,80	0,55	1,12	1,10

Sumber: BPS, 2006 dan Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2007 (diolah)

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli (PAD), Belanja Rutin (BR), dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Pagar Alam, 2003 - 2006

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi BR	IKR (%)	Realisasi Belanja Pegawai (BP)	Realisasi BR dikurangi BP	IKR (%)
2003	3.719.555.227	71.656.976.714	5,19	31.471.998.409	40.184.978.305	9,26
2004	2.653.069.156	95.163.437.742	2,79	66.504.786.457	28.658.651.285	9,26
2005	5.592.329.985	88.545.955.448	6,32	43.461.826.417	45.084.129.031	12,40
2006	5.669.845.372	38.418.769.256	14,76	33.591.604.795	4.827.164.461	117,46
Rata-rata	4.408.699.935	73.446.284.790	7,26	43.757.554.020	29.688.730.771	37,09

Sumber : Bagian Keuangan Kota Pagar Alam , 2007 (diolah)

Tabel 9. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pagar Alam 2002 – 2006

Tahun Anggaran	PAD	BHPBP	SB	TPD	PAD/TPD (%)	BHPBP/TPD (%)	SB/TPD (%)
2003	3.719.555.227	35.373.109.662	91.787.295.900	130.879.960.789	2,84	27,03	70,13
2004	2.653.069.156	55.256.188.762	97.820.842.800	155.730.100.718	1,70	35,48	62,81
2005	5.592.329.985	77.616.570.767	101.719.000.000	184.927.900.752	3,02	41,97	55,00
2006	5.669.845.372	94.417.059.994	164.212.659.700	264.299.565.066	2,15	35,72	62,13
Rata-rata	4.408.699.935	65.665.732.296	113.884.949.600	183.959.381.831	2,43	35,05	62,52

Sumber : Bagian Keuangan Kota Pagar Alam, 2007 (diolah)

Tabel 10. Indeks Pelayanan Publik Per Kapita Kota Pagar Alam, 2003 – 2005

Th. Anggaran	SKF (Rp)	PPP (Rp)	IPPP (%)
2003	1.252.903,89	1.208.419,21	96,45
2004	1.379.440,62	1.365.553,86	98,99
2005	1.412.287,60	1.395.900,43	98,84
Rata-rata	1.348.210,70	1.323.291,17	98,09

Sumber : BPS dan Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2005 (diolah)

Tabel 11. Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPAD) Kota Pagar Alam 2003 – 2006

Tahun	PAD	PDRB	UPAD(%)
2003	3.719.555.227	466.216.000.000	0,80
2004	2.653.069.156	481.654.000.000	0,55
2005	5.592.329.985	498.639.000.000	1,12
2006	5.669.845.372	517.559.000.000	1,10
Rata-rata	4.408.699.935	491.017.000.000	0,89

Sumber : BPS, 2006 (diolah)

**Tabel 12. Elastisitas PAD terhadap PDRB Kota Pagar Alam
Dengan Tahun Dasar 2000**

Tahun	PAD		PDRB		Elastisitas Ey
	Realisasi	% Δ	Konstan	% Δ	
2003	3.719.555.227	-	466.216.000.000	-	-
2004	2.653.069.156	-0,29	481.654.000.000	0,03	-8,66
2005	5.592.329.985	1,11	498.639.000.000	0,04	31,42
2006	5.669.845.372	0,01	517.559.000.000	0,04	0,37
Rerata		0,28		0,04	7,71

Sumber: BPS dan Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2006 (diolah)

**Tabel 13. Pengeluaran Kota Pagar Alam tahun 2003-2006
(Dalam Juta Rupiah)**

No.	Uraian	2003	2004	2005	2006
A	1. Belanja Rutin	71.657	-	-	-
	2. Belanja Pembangunan	77.093	-	-	-
B	1. Belanja Aparatur Daerah	-	95.163	88.546	100.565
	2. Belanja Pelayanan Publik	-	45.227	75.397	134.212
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	-	5.834	4238	6.308
	4. Belanja Tidak Tersangka	-	1.295	1974	1.839
	Jumlah Belanja	148.750	147.519	170.155	242.923

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam, 2006 (diolah)